

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Anggota DPRD Mencecar, Ancol Tolak Disebut Reklamasi

Gambir, Warta Kota

Soal reklamasi di Taman Impian Jaya Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dibahas dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Pemprov DKI Jakarta, pada Rabu (8/7).

Dalam rapat itu, anggota DPRD DKI mencecar anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mempertanyakan status Pulau L yang izin reklamasinya telah dicabut Anies pada 2018 lalu. Sebab dalam Surat Keputusan (SK) gubernur sebelumnya, rencana proyek Pulau L seluas 481 merupakan milik PT Manggala Kridayuda.

Tapi sekarang berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta

Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 Hektar, yang diteken Anies, 120 hektar di Pulau L menjadi proyek Ancol.

"Di ketentuan (SK) lama, itu 17 pulau yaitu Pulau J dan K adalah milik Jaya Ancol, sedangkan Pulau L itu miliknya Manggala Kridayuda," kata Gilbert.

Selain status kepemilikan proyek berubah, rencana perluasan lahan di Ancol juga berubah menjadi Pulau K dan M. Hal itu, kata dia, berdasarkan SK yang diteken Anies.

"Itu tadi yang saya katakan, saya agak sedikit kebingungan pak, semua serba tidak jelas," ujarnya.

Diberikan Ancol

Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPI) pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Rully Irzal mengatakan, sebenarnya pada 21 September 2012 lalu, izin prinsip pembangunan Pulau L diberikan kepada Ancol.

Kemudian dari kebijakannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018 mencabut semua izin reklamasi kecuali Pulau C, D, G dan M karena sudah selesai



MENOLAK REKLAMASI — Puluhan pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Nasional Tolak Reklamasi Jakarta berunjuk rasa di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/7). Mereka membakar ban dan nyaris ricuh dengan petugas.

bangun.

"Sebenarnya 120 hektar yang di Ancol Timur itu bagian dari sisi selatannya Pulau L. Jadi Pulau L itu izin prinsipnya diserahkan kepada Ancol pada 2012," jelas Rully.

Menyatu

Sementara itu anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mempertegas soal status Pulau L yang izin pembangunannya dicabut namun masuk dalam bagian reklamasi Ancol. "Berarti yang perluasan itu Pulau L?," kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Mendengar pertanyaan itu, Rully menjawab bahwa daratan itu dahulu memang benar Pulau L. Tetapi kare-

na izinnya sudah dicabut, maka daratan buatan itu tak bisa lagi disebut menjadi bagian dari reklamasi yang pernah ditentang Anies Baswedan.

Selain itu, proyek tersebut juga tak bisa disebut lagi sebagai Pulau L, lantaran lahan bikinan itu dibuat menyatu dengan daratan Ancol. "Itu bagian dari Pulau L, tapi sekarang tidak lagi karena tergabung dengan daratan," jawab Rully.

Perluasan lahan

Sedangkan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol menyatakan perluasan lahan di kawasan Ancol Timur dan Barat tidak bisa disebut sebagai proyek reklamasi.

Soalnya lahan buatan itu dibuat menyatu dengan bibir pantai Ancol, sehingga proyek itu lebih tepat disebut sebagai perluasan lahan.

Hal itu sama persis seperti Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 Hektar. Melalui surat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin kepada Ancol untuk melakukan pengembangan tempat rekreasi, meski lokasinya berada di atas air.

"Jadi ini perluasan daratan, kan nempel ke darat," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali.

Terpisah, Manager Komunikasi Perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari menjamin proyek yang rencananya dilakukan pada 2021 mendatang tidak akan mengganggu aktivitas nelayan yang ada di dekat laut Ancol. Bahkan lintasan melaut bagi para nelayan tidak akan terpotong.

"Kami lihat lagi kajiannya, tapi sejauh ini tidak ada masalah ya. Kami juga dengan teman-teman nelayan juga ada pembinaan," ujarnya. (faf/jhs)